

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik di era desentralisasi saat ini. Masyarakat semakin kritis dalam mengamati bagaimana pemerintah daerah mengelola dana publik yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan bersama. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen penting yang mencerminkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam administrasi publik. Tanpa akuntabilitas yang solid, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan terkikis dan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam tata kelola pemerintahan (Silvia & Annisa, 2025).

Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik yang telah dipercayakan. Dokumen ini menjadi media komunikasi utama antara pemerintah dan masyarakat mengenai kinerja keuangan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks demokrasi, laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan membuat keputusan politik yang informatif. Pertanggungjawaban ini bukan sekadar kewajiban formal, melainkan esensi dari hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara (Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki karakteristik khusus yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku di

Indonesia. Karakteristik tersebut meliputi relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diterapkan di Indonesia menuntut pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan hak dan kewajiban ekonomis, bukan sekadar arus kas. Pemenuhan karakteristik ini menjadi prasyarat mutlak agar laporan keuangan dapat berfungsi efektif sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (Tirza Oktovianti Lenggono, 2024).

Kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam implementasinya. Dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 yang diperiksa BPK, tercatat 491 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 53 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Capaian opini WTP oleh pemerintah kabupaten dan kota masing-masing sebesar 89,6% dan 96% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 85% dan 95%.

Kategori Pemda	Jumlah LKPD 2024	Opini WTP	Persentase WTP	Target RPJMN
Pemerintah Kabupaten	-	-	89,6%	85%
Pemerintah Kota	-	-	96,0%	95%
Total Semua Pemda	545	491	90,1%	-

Sumber: BPK RI (2025) sebagaimana dikutip dalam Warta BPK

Meskipun capaian nasional menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan kualitas yang signifikan antar daerah yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa daerah masih kesulitan

dalam menerapkan standar akuntansi secara konsisten dan konsisten akibat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Variasi kualitas ini mengindikasikan bahwa pencapaian opini WTP tidak serta merta mencerminkan kualitas laporan keuangan yang sebenarnya berkualitas tinggi dalam semua aspek.

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun demikian, BPK memberikan penekanan atas beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian. Dalam laporan hasil pemeriksaan disebutkan bahwa terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp25.353.010.904 yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan lain akibat kesulitan likuiditas. Selain itu, terdapat utang belanja sebesar Rp100.472.681.422 per 31 Desember 2025 yang terjadi karena ketidakcukupan dana kas daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh opini WTP, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi memengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan. Permasalahan tersebut mengindikasikan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi penting untuk dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi fondasi kritis dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan kerangka konseptual yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diwajibkan sejak 2015 menuntut transformasi mendasar dalam sistem akuntansi pemerintah dari basis kas menuju akrual. Tanpa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang konsisten dan tepat, laporan keuangan tidak dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas pemerintah (Rizky Ramadhan, 2024).

Variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dipilih sebagai variabel independen pertama karena peran sentralnya dalam standarisasi pelaporan keuangan pemerintah di seluruh Indonesia. Penelitian Hidayat dan Pratama (2024) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Serang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugraha (2025) yang membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Kepulauan Aru (Anggita Nur Setyarini, Sri Ambarwati, 2024; Rizky Ramadhan, 2024; Tirza Oktovianti Lenggono, 2024).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan krusial dalam menjamin keandalan, integritas, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi melalui efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dalam konteks pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi mekanisme pencegahan fraud, kesalahan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Tanpa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, risiko kesalahan material dan ketidakpatuhan dalam laporan keuangan akan meningkat secara signifikan (Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penelitian ini menjadi variabel independen kedua mengingat fungsi strategisnya dalam memastikan kualitas proses menghasilkan laporan keuangan. Penelitian Rahman dan Ali (2025) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Ahmad dan Rahman (2025) pada Kabupaten Gorontalo Utara yang menunjukkan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi, 2024; Novita Nasir, Rio Monoarfa, 2025; Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Namun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seperti penelitian sebelumnya di Kota Medan yang menemukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya faktor kontekstual yang memengaruhi hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kualitas laporan keuangan yang perlu diesksplorasi lebih lanjut. Inkonsistensi hasil penelitian ini menjadi dasar kuat untuk melakukan penelitian lanjutan dengan konteks dan lokasi yang berbeda.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah menjadi semakin krusial di era transformasi digital yang terjadi secara global dan nasional. Sistem informasi keuangan pemerintah memungkinkan otomatisasi proses akuntansi, integrasi data antar departemen, dan peningkatan akurasi dalam pelaporan keuangan. Teknologi informasi juga memungkinkan transparansi melalui e-government dan opens data yang memudahkan masyarakat mengakses informasi keuangan pemerintah daerah. Tanpa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, efisiensi dan akurasi proses keuangan sulit tercapai di era modern (Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Variabel pemanfaatan teknologi informasi dipilih sebagai variabel independen ketiga karena relevansinya yang tinggi dengan transformasi digital pemerintahan saat ini. Penelitian Rahman dan Ali (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian Pakawaru (2025) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi di Kota Palu (Muhammad Ilham Pakawaru, 2025; Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Meskipun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda mengenai pengaruh teknologi informasi. Penelitian Hidayat dan Pratama (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Serang. Penelitian Hardiansyah dan Hasanudin (2024) juga melaporkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Desa PDTT (Anggita Nur Setyarini, Sri Ambarwati, 2024; Hardiansyah & Hasanudin, 2024; Rizky Ramadhan, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang menguji secara simultan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut serta memberikan bukti empiris baru pada konteks Pemerintah Kota Banda Aceh.

Research gap yang jelas terlihat dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan sementara penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Inkonsistensi ini menuntut penelitian lanjutan dengan konteks geografis,

karakteristik entitas, dan spesifikasi variabel yang berbeda untuk mengklarifikasi hubungan antara teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.

Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian dengan ketiga variabel independen secara simultan masih terbatas dilakukan di konteks kota kecil dengan karakteristik khusus seperti Banda Aceh. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada daerah dengan karakteristik berbeda atau hanya menggunakan dua dari tiga variabel dalam model penelitian. Penelitian yang menggabungkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan teknologi informasi secara simultan dalam satu model masih jarang ditemukan di literatur akuntansi pemerintahan Indonesia.

Keterbatasan penelitian sebelumnya yang pertama adalah sebagian besar penelitian terdahulu tidak menguji ketiga variabel secara simultan dalam satu model penelitian yang komprehensif. Penelitian Hidayat dan Pratama (2024) menguji ketiga variabel tetapi hanya di Kota Serang dengan karakteristik urban yang berbeda. Penelitian Rahman dan Ali (2025) hanya menguji Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan teknologi informasi tanpa memasukkan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dalam model (Anggita Nur Setyarini, Sri Ambarwati, 2024; Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025).

Keterbatasan penelitian sebelumnya yang kedua adalah kurangnya penelitian yang dilakukan di wilayah Aceh dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang unik pasca otonomi khusus. Mayoritas penelitian akuntansi pemerintahan di Indonesia terpusat di Jawa dan Sumatera bagian selatan sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi untuk wilayah Aceh. Konteks

otonomi khusus Aceh dengan penerapan syariat Islam memberikan nuansa tersendiri dalam tata kelola keuangan daerah yang memerlukan penelitian tersendiri.

Keterbatasan penelitian sebelumnya yang ketiga adalah inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh teknologi informasi yang tidak terjawab dengan jelas dalam literatur existing. Perbedaan temuan antara penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan dan tidak signifikan memerlukan klarifikasi melalui penelitian dengan sampel dan konteks yang lebih spesifik. Tanpa penelitian lanjutan, praktik pengelolaan keuangan daerah akan kesulitan menentukan prioritas investasi teknologi informasi.

Kontribusi baru penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pemerintahan adalah menguji simultan ketiga variabel determinan kualitas laporan keuangan dalam satu model penelitian yang komprehensif. Penelitian ini akan memberikan bukti empiris baru mengenai hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan di konteks kota dengan karakteristik khusus seperti Banda Aceh. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akuntansi pemerintahan dengan bukti dari wilayah yang sebelumnya kurang terwakili dalam penelitian.

Kontribusi kedua penelitian ini adalah mengklarifikasi research gap mengenai pengaruh teknologi informasi yang inkonsisten dalam penelitian terdahulu. Dengan menggunakan sampel dan konteks yang berbeda, penelitian ini akan memberikan bukti empiris baru yang dapat memperjelas hubungan sebenarnya

antara teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Klarifikasi ini penting bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas investasi teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan daerah.

Kontribusi ketiga penelitian ini adalah memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan daerah lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui tiga jalur intervensi strategis. Temuan penelitian akan menjadi dasar empiris bagi pengambilan keputusan mengenai penguatan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rekomendasi berbasis bukti empiris ini lebih kredibel dan dapat diandalkan dibandingkan rekomendasi yang hanya berdasarkan teori atau pengalaman semata.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, sedangkan penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh masih relatif terbatas. Padahal Aceh memiliki karakteristik kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang berbeda karena status otonomi khusus yang dimilikinya. Penelitian yang menguji secara simultan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Banda Aceh juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut sekaligus memberikan bukti empiris baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Alasan pemilihan variabel penelitian ini didasarkan pada relevansi teoritis dan praktis ketiga variabel terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dibuktikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dipilih karena menjadi standar baku pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia yang wajib diterapkan oleh semua entitas pemerintah. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipilih karena peran strategisnya dalam menjamin keandalan proses menghasilkan laporan keuangan (Tihajar, Murhaban, Naz'aina, 2025; Tirza Oktovianti Lenggono, 2024).

Variabel teknologi informasi dipilih karena relevansinya yang tinggi dengan transformasi digital pemerintahan dan potensi dampaknya terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Ketiga variabel ini dipilih secara simultan karena saling berinteraksi dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan meskipun dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda (Muhammad Ilham Pakawaru, 2025; Novita Nasir, Rio Monoarfa, 2025; Rizky Ramadhan, 2024).

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan publik. Kedua, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan lain akibat kesulitan likuiditas serta adanya utang belanja yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah memperoleh opini WTP, masih terdapat aspek pengelolaan keuangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

Oleh karena itu, Kota Banda Aceh dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat target RPJMN 2020-2024 untuk capaian opini WTP pemerintah kota adalah 95% yang telah terlampaui menjadi 96% pada tahun 2024. Namun, pencapaian opini WTP yang tinggi tidak serta merta berarti kualitas laporan keuangan sudah optimal di semua aspek. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjadi dasar kebijakan peningkatan kualitas.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Banda

Aceh mendapat alasan kuat untuk dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan maupun secara praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan guna menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi dan digitalisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.

3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Beberapa manfaat praktis yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat

digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek penelitian yang berbeda.

.